

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, adanya pembangunan telah menciptakan banyak perubahan positif bagi Indonesia. Tidak hanya dari ukuran fisik, berbagai sarana baik pada kawasan pedesaan maupun kawasan perkotaan juga tidak ketinggalan telah banyak mengalami perkembangan yang mempermudah kemajuan negara. Karena pada dasarnya tujuan dari pembangunan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum pada sila kelima Pancasila.

Secara umum, pembangunan merupakan suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh lembaga perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk menciptakan perubahan sebagai salah satu proses usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara konsep, pembangunan adalah proses perbaikan yang berhubungan dengan suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera atau lebih baik, sehingga memiliki alternatif cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebuah negara. Landasan pembangunan tidak hanya pada pendapatan per kapita, tetapi lebih dari itu dan harus disertai dengan membaiknya distribusi pendapatan dan berkurangnya kemiskinan, serta menurunnya tingkat pengangguran. (Drajat Kartono, 2016)

Dijelaskan oleh (Amala, 2018) bahwa patokan keberhasilan pembangunan bisa diamati dari angka pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi serta semakin rendahnya disparitas atau kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah maupun antar sektor. Pembangunan ekonomi merupakan representasi dari

berbagai kebijakan pemerintah yang dilakukan demi menciptakan perubahan positif, baik itu perubahan pada struktur ekonomi, perubahan sosial, angka kemiskinan ataupun upaya untuk pemerataan ketimpangan (disparitas) dan angka pengangguran. (Badriah, 2019)

Sementara itu, pengertian pembangunan ekonomi menurut Sadono Sukirno ialah upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan cara mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penambahan pengetahuan, penggunaan teknologi, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen, serta peningkatan keterampilan. (Sukirno, 2014). Pengertian lain dari pembangunan ekonomi yaitu upaya untuk meningkatkan taraf hidup sebuah bangsa yang seringkali dinilai dari angka pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi sebagai sebuah tahap yang memuat perubahan sikap hidup, struktur, dan kelembagaan selain mencakup meningkatnya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan dan mematahkan kemiskinan. (Todaro & Smith, 2020)

Akan tetapi dalam kenyataannya, adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali tidak diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata. Padahal dengan adanya distribusi pendapatan yang merata menimbulkan terwujudnya kestabilan sosial dan politik serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Lewis, akan muncul berbagai masalah apabila usaha pembangunan hanya difokuskan pada satu sektor saja. Dengan tidak adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor memungkinkan timbul adanya ketidakstabilan dan gangguan pada kelancaran kegiatan ekonomi sehingga menghambat proses pembangunan. (Arsyad, 2017)

Ketimpangan (disparitas) antar daerah ialah dampak yang timbul dari prosedur pembangunan yang menggambarkan sebuah fase perubahan pada pembangunan itu sendiri. Kesenjangan tingkat kesuksesan antar daerah yang terlampau jauh akan mengakibatkan dampak yang merugikan terhadap pertumbuhan daerah. Selain ketimpangan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi, tujuan proses pembangunan adalah untuk menyapu dan meminimalisir angka kemiskinan, disparitas pendapatan dan pengangguran. (Syahputri, 2016)

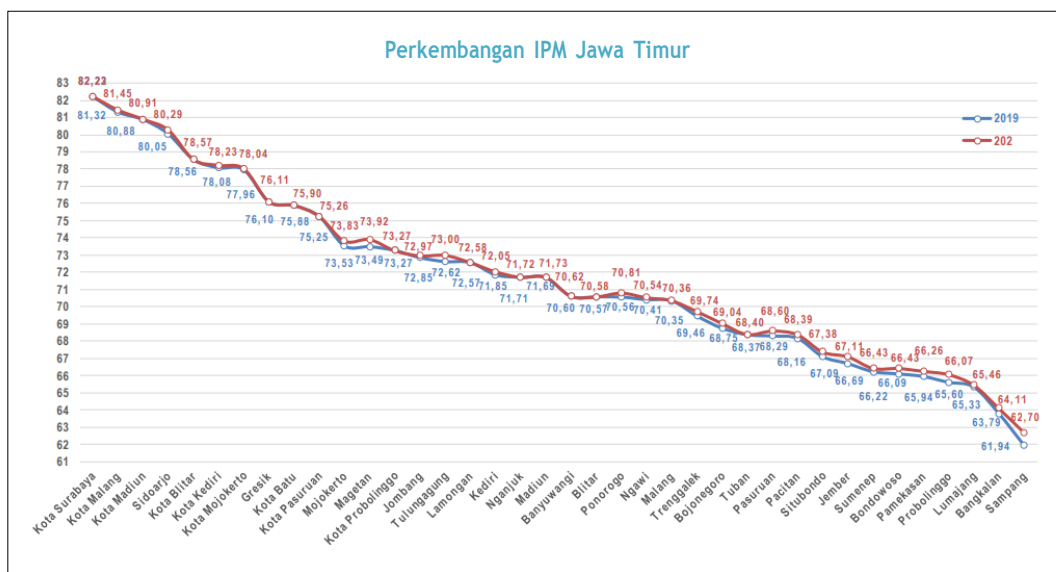
Singkatnya, dengan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi mampu membuat seluruh sektor dapat tumbuh bersama. Oleh sebab itu, diperlukan adanya keseimbangan antara sisi permintaan dengan sisi penawaran. Pada sisi penawaran mengutamakan pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama dari setiap sektor yang bersinggungan dan aktif dalam meningkatkan penawaran barang. Dan sebaliknya, pada sisi permintaan berkaitan dengan penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan supaya permintaan barang dan jasa tumbuh optimal. Setiap daerah memiliki kondisi perekonomian yang cenderung berbeda satu sama lain, dimana semakin tinggi ketidaksetaraan kondisi ekonomi dalam masyarakat menandakan adanya ketimpangan pada wilayah tersebut. (Siwu, 2017)

Menurut Philip, kebijakan ekonomi regional dan perkotaan berbeda dari bentuk-bentuk kebijakan ekonomi sektor publik lainnya, yaitu secara eksplisit terkait dengan pertanyaan geografi. Ekonomi regional berfokus pada kedekatan dan biaya transportasi, meningkatkan skala pengembalian dan eksternalitas. Sedangkan pada tingkat perkotaan kebijakan ekonomi yang diterapkan secara spekulatif dan umumnya melibatkan usaha untuk menambah daya tarik daerah

perkotaan atau pinggiran kota sebagai lokasi investasi sehingga ekonomi perkotaan cenderung berfokus pada hubungan antara sektor pembangunan real-estate dan properti, namun selain sektor tersebut potensi lain juga perlu diperhitungkan. (McCann, 2013)

Grafik 1.1:

**Laju Pertumbuhan Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) Jawa Timur
Tahun 2010-2020**



Sumber: Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, 2021

Secara administratif, Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 wilayah kabupaten dan 9 wilayah kotamadya. Menurut Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2018-2020) rata-rata IPM di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 71,71%. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat jumlah penduduk wilayah kotamadya di Jawa Timur pada tahun 2020 yaitu sebanyak 5.142.379 jiwa. Dimana jumlah tersebut hanya sebesar 12,65% dari keseluruhan jumlah penduduk Jawa Timur. Sedangkan, jumlah penduduk wilayah kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2020 yaitu sebanyak 35.523.317 jiwa atau sebesar 87,35% dari keseluruhan jumlah penduduk Jawa Timur.

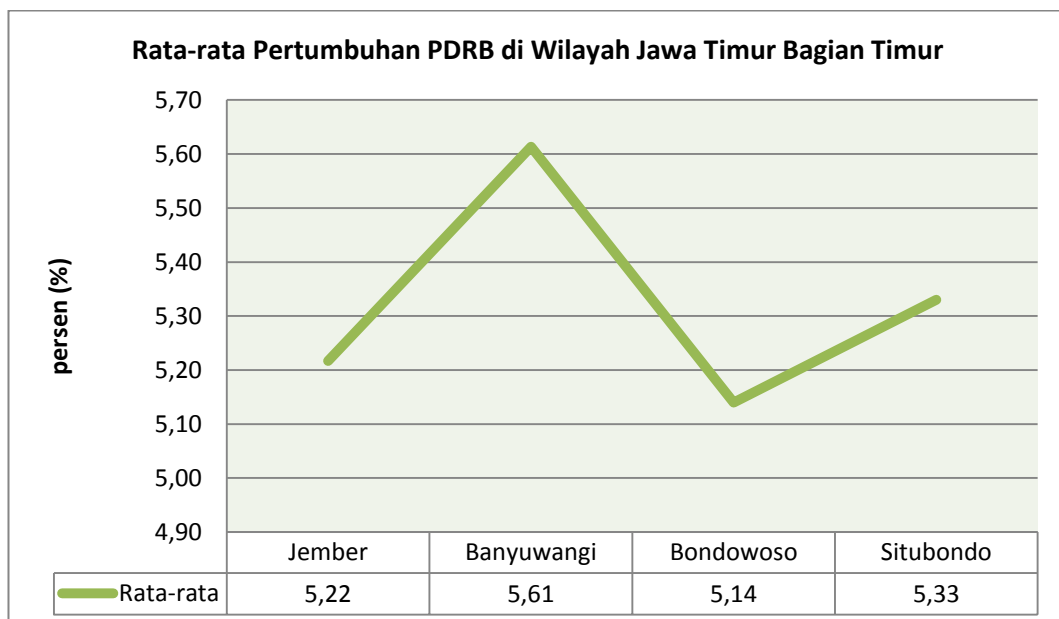
Secara makro, kinerja perekonomian suatu daerah dapat digambarkan melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebab di dalam nilai tersebut telah mencakup semua output barang dan jasa yang sudah dihasilkan selama jangka waktu tertentu. Proses kenaikan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat sering dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dari nilai produk domestik regional bruto (PDRB) tersebut bisa diketahui berbagai indikator, antara lain seperti pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi, dan kemampuan sumberdaya ekonomi sebuah wilayah serta pencapaian aktivitas sebuah wilayah. Jawa Timur adalah daerah industri terbesar kedua di Indonesia. Namun sebagai provinsi yang masih berkembang, ketimpangan atau disparitas di Jawa Timur menjadi fenomena yang umum terjadi, khususnya pada Wilayah Jawa Timur Bagian Timur.

Daerah yang berada di sekitar wilayah pedalaman dan terletak di bagian timur Provinsi Jawa Timur biasanya dikenal dengan sebutan Wilayah Karesidenan Besuki. Wilayah Karesidenan Besuki adalah bekas wilayah administratif pemerintahan zaman Hindia Belanda. Selama Pemerintahan Hindia Belanda, Karesidenan Besuki adalah daerah yang cukup penting, hal ini karena daerah ini mempunyai potensi ekonomi yang besar, baik pada komoditas pertanian seperti beras maupun komoditas perkebunan tanaman ekspor seperti tembakau, kopi, dan tebu. Namun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1950 tentang Pemindahan Kekuasaan Residen Kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atau Gubernur, wilayah ini sekarang telah menjadi daerah Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. (Ana, 2016)

Menurut (Taufik, 2016) salah satu sektor unggulan di wilayah Jawa Timur Bagian Timur adalah pertanian. Wilayah Jawa Timur Bagian Timur merupakan sedikit di antara daerah di Jawa yang mempunyai peluang untuk melakukan perluasan lahan pertanian. Pada wilayah Jawa Timur Bagian Timur, dari keempat wilayah kabupaten hanya ada dua kabupaten yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang masuk kategori baik, sementara dua kabupaten yang lain memiliki angka rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah. Berdasarkan data yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2020 menunjukkan terjadinya penurunan pada laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di seluruh kabupaten maupun kotamadya yang ada di Provinsi Jawa Timur khususnya pada wilayah Jawa Timur bagian timur.

Grafik 1.2:

**Rata-Rata Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa Timur Bagian Timur
Tahun 2016-2020 (Persen)**

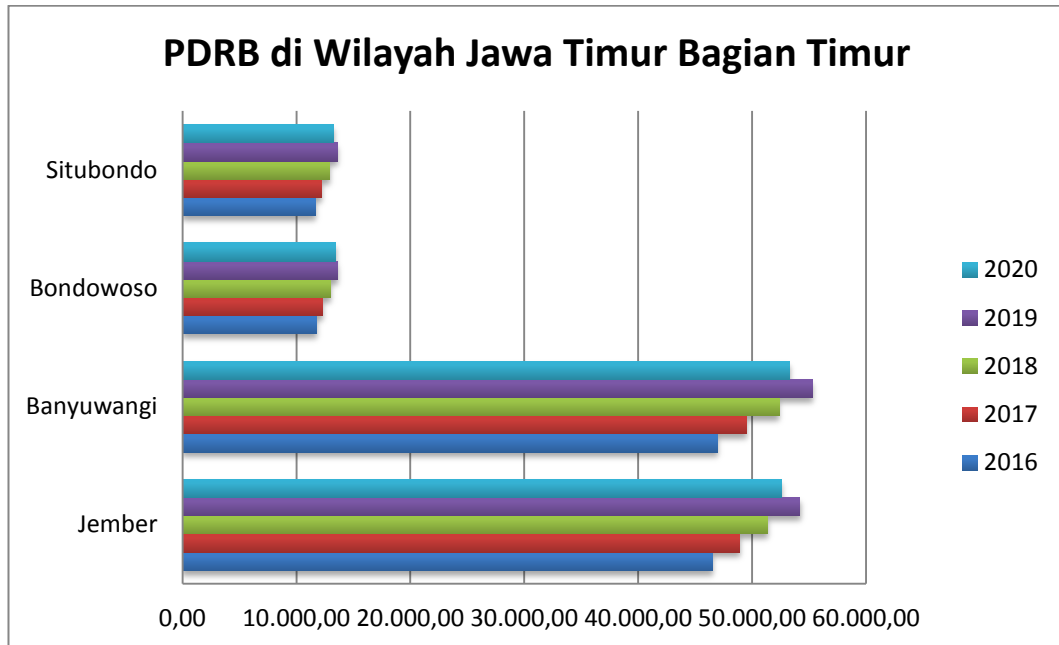


Sumber: BPS Jawa Timur diolah, 2021

Dari grafik diatas diketahui bahwa rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi dengan rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,61 persen, lalu Kabupaten Situbondo dengan rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,33 persen dan disusul dengan Kabupaten Jember adalah sebesar 5,22 persen, dan yang terakhir adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso yang diketahui sebesar 5,14 persen. Akan tetapi, diketahui pada tahun 2020 laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Jawa Timur Bagian Timur juga mengalami penurunan.

Diketahui penurunan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Jawa Timur Bagian Timur pada tahun 2020 paling tinggi ditempati oleh Kabupaten Banyuwangi yang laju pertumbuhannya ditunjukkan sebesar -3,58 persen, disusul dengan penurunan laju pertumbuhan PDRB pada Kabupaten Jember dengan laju pertumbuhan sebesar -2,98 persen, yang selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Situbondo dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar -2,33 persen dan terakhir wilayah yang mengalami penurunan PDRB paling rendah di antara empat anggota wilayah Jawa Timur Bagian Timur dimiliki oleh Kabupaten Bondowoso yaitu sebesar -1,36 persen. Perlambatan laju pertumbuhan PDRB di Kawasan Jawa Timur Bagian Timur terjadi pada hampir di seluruh komponen permintaan dan berdampak pada penurunan konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, investasi, dan net ekspor antar daerah. Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK di wilayah Jawa Timur Bagian Timur dapat ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 1.3:
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Wilayah Jawa Timur Bagian
Timur Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)



Sumber: BPS Jawa Timur diolah, 2021

Dari grafik 1.3 tersebut diketahui dalam lima tahun terakhir terdapat selisih angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Jawa Timur Bagian Timur (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo). Dimana dari keempat wilayah kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur Bagian Timur, hanya dua kabupaten yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang masuk kategori baik yaitu Kabupaten Banyuwangi dengan rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 51.468,372 miliar rupiah dan Kabupaten Jember dengan rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 50.720,728 miliar rupiah, sementara dua kabupaten yang lain memiliki angka rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah yaitu pada Kabupaten Situbondo dengan rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 12.730,31

miliar rupiah dan Kabupaten Bondowoso dengan rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 12.820,38 miliar rupiah.

Hal ini terjadi karena setiap daerah di wilayah Jawa Timur Bagian Timur memiliki kondisi perekonomian yang cenderung berbeda satu sama lain, dimana semakin tinggi ketidaksetaraan kondisi ekonomi dalam masyarakat menandakan adanya ketimpangan pada wilayah tersebut. Ketimpangan ini juga berimplikasi pada kebutuhan daerah yang berbeda. Terdapat perbedaan pada kemampuan setiap daerah untuk membangun dan juga memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing, hal ini disebabkan karena pengaruh adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimilikinya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan maupun sumber daya sosial. Oleh karena itu, diperlukan rencana pembangunan yang disusun dengan baik agar pembangunan ekonomi daerah dapat terlaksana dengan baik.

Maka dengan adanya selisih pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cukup tajam di wilayah Jawa Timur Bagian Timur, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ketimpangan wilayah yang terjadi pada wilayah Jawa Timur Bagian Timur sesuai dengan tujuan dari pembangunan ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan ketimpangan pembangunan wilayah. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini akan dilaksanakan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui disparitas ekonomi yang terjadi di empat kabupaten yang merupakan bagian wilayah dari Kawasan Karesidenan Besuki di Provinsi Jawa Timur dalam judul penelitian **“Analisis Potensi dan Disparitas Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten di Wilayah Jawa Timur Bagian Timur”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan uraian pada latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan pokok permasalahan:

1. Apakah terdapat sektor yang tumbuh relatif lebih cepat di wilayah yang lebih kecil dibandingkan wilayah yang lebih besar pada wilayah Jawa Timur bagian timur?
2. Bagaimana tingkat disparitas ekonomi antar kabupaten yang terjadi pada wilayah Jawa Timur bagian timur?
3. Bagaimana pola dan struktur ekonomi pada wilayah Jawa Timur bagian timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai sehubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui sektor yang tumbuh relatif lebih cepat di wilayah yang lebih kecil dibandingkan wilayah yang lebih besar pada wilayah Jawa Timur bagian timur.
2. Untuk mengetahui tingkat disparitas ekonomi antar kabupaten yang terjadi pada wilayah Jawa Timur bagian timur.
3. Untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi pada wilayah Jawa Timur bagian timur.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini memuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Data dalam penelitian menggunakan data *time series* pada tahun periode 2011 sampai 2020 pada Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo.
2. Penelitian ini menggunakan 3 alat analisis yaitu Analisis *Shift Share*, Analisis *Indeks Williamson*, Analisis *Tipologi Klassen*. Dalam Analisis *Shift Share* dan Analisis *Tipologi Klassen* variabel yang digunakan yaitu PDRB di Kabupaten dan PDRB di Provinsi, sedangkan untuk Analisis *Indeks Williamson* menggunakan variabel PDRB per kapita di Kabupaten, PDRB per kapita di Provinsi, Jumlah penduduk Kabupaten, dan Jumlah penduduk seluruh.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Memberikan masukan untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya pada keempat daerah bagian timur Provinsi Jawa Timur untuk membuat penyusunan perencanaan daerah pada tahap selanjutnya.
2. Sebagai referensi untuk masyarakat dan calon investor yang akan menanamkan modalnya di Wilayah Jawa Timur Bagian Timur.